POLITIK IDENTITAS MELAYU : PEMANFAATAN KETOKOHAN GENEALOGIS DAENG CELAK DAN DAENG MAREWA DALAM LEGITIMASI KULTURAL DI KOTA TANJUNGPINANG

Nabila Fakhirah Alma
NPP. 33.0564
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: nabila180204@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Heru Rochmansjah, S.H., M.Si
Email: heru_rochmansjah@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *The cultural legitimacy of Daeng Celak and Daeng Marewa's genealogical figures in Tanjungpinang City has yet to receive equal recognition among its heterogeneous society, despite various efforts undertaken by local government and customary institutions.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the strategies, mechanisms, and meanings behind the utilization of the genealogical figures of Daeng Celak and Daeng Marewa by their descendants in building Malay identity politics as an effort to obtain cultural legitimacy in Tanjungpinang City.* ***Method:*** *This study employs a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews with descendants, customary leaders, and local government bureaucrats, supported by field observations and documentation. Data analysis was conducted using Manuel Castells* (2010) *identity politics theory through three main dimensions: legitimizing identity, resistance identity, and project identity.* ***Result:*** *The results indicate that of the three dimensions, two have been fulfilled while one has not been maximally achieved. The legitimizing identity dimension is fulfilled through the use of titles, genealogical records, and integration of genealogical symbols into local government cultural policies. The project identity dimension is fulfilled through transformative efforts of repositioning genealogical narratives via cultural festivals and city branding. However, the resistance identity dimension has not been maximally fulfilled due to strong resistance from non-Malay communities who view the genealogical narrative as exclusive and elitist, resulting in cultural legitimacy that remains partial and unevenly distributed.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the utilization of genealogical figures of Daeng Celak and Daeng Marewa has been fulfilled in the legitimizing identity and project identity dimensions, but remains suboptimal in the resistance identity dimension as the genealogical narrative is still perceived as exclusive by parts of society. It is recommended that the narrative be repackaged inclusively through cross-ethnic dialogues involving all elements of Tanjungpinang society to broaden cultural legitimacy recognition comprehensively.*

Keywords: *Cultural Legitimacy; Genealogical Figures; Identity Politics; Malay Identity; Tanjungpinang*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research Gap*): Legitimasi kultural berbasis genealogis Daeng Celak dan Daeng Marewa di Kota Tanjungpinang belum memperoleh pengakuan yang merata di tengah masyarakat yang heterogen, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun lembaga adat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi, mekanisme, dan makna di balik pemanfaatan ketokohan genealogis Daeng Celak dan Daeng Marewa oleh para keturunannya dalam membangun politik identitas Melayu sebagai upaya memperoleh legitimasi kultural di Kota Tanjungpinang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam bersama aktor keturunan, tokoh adat, dan birokrat pemerintah daerah, serta didukung oleh observasi lapangan dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori politik identitas Manuel Castells (Castells, 2010) melalui tiga dimensi utama yaitu *legitimizing identity*, *resistance identity*, dan *project identity*. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga dimensi tersebut, dua dimensi telah terpenuhi sementara satu dimensi belum tercapai secara maksimal. Dimensi *legitimizing identity* terpenuhi melalui penggunaan gelar, silsilah, dan integrasi simbol genealogis ke dalam kebijakan budaya pemerintah daerah. Dimensi *project identity* terpenuhi melalui upaya transformatif berupa *repositioning* narasi genealogis melalui festival budaya dan *city branding*. Namun demikian, dimensi *resistance identity* belum terpenuhi secara maksimal karena masih kuatnya resistensi dari masyarakat non-Melayu yang memandang narasi genealogis sebagai sesuatu yang eksklusif dan elitis, sehingga legitimasi kultural yang diperoleh masih bersifat parsial dan belum merata di seluruh lapisan masyarakat. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan ketokohan genealogis Daeng Celak dan Daeng Marewa telah terpenuhi pada dimensi *legitimizing identity* dan *project identity*, namun belum optimal pada dimensi *resistance identity* karena narasi genealogis masih dipandang eksklusif oleh sebagian masyarakat. Adapun saran penelitian ini yakni perlunya mengemas ulang narasi genealogis secara inklusif melalui dialog lintas etnis yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Tanjungpinang guna memperluas pengakuan legitimasi kultural secara menyeluruh.

Kata kunci: Identitas Melayu; Ketokohan Genealogis; Legitimasi Kultural; Politik Identitas; Tanjungpinang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kajian ilmu pemerintahan dan ilmu sosial kontemporer, identitas tidak lagi dipahami sebagai entitas yang bersifat tetap, melainkan sebagai konstruksi sosial yang terus diproduksi melalui interaksi historis, budaya, dan relasi kekuasaan. Castells (Castells, 2010) menegaskan bahwa identitas bukanlah entitas tunggal, melainkan konstruksi sosial dinamis yang lahir dari makna kolektif dalam ruang kontestasi. Sejalan dengan itu, Hall (1996) menjelaskan bahwa identitas bersifat tidak pernah final dan senantiasa mengalami proses negosiasi makna secara terus-menerus dalam ruang sosial. Di Indonesia, identitas sering kali berkembang menjadi instrumen politik yang dikenal sebagai politik identitas guna memperoleh pengakuan sosial, posisi simbolik, maupun legitimasi dalam struktur masyarakat (Taylor, 1994). Pengakuan (*recognition*) terhadap identitas ini menjadi kebutuhan moral dan politik yang mendasar agar suatu kelompok tidak terpinggirkan secara sosial maupun psikologis.

Salah satu bentuk politik identitas yang berkembang secara spesifik pada level lokal adalah pemanfaatan narasi genealogis atau garis keturunan sebagai sumber legitimasi kultural. Dalam masyarakat yang cenderung paternalistik, posisi sosial yang didasarkan pada garis keturunan tokoh

besar sering kali lebih mudah memperoleh penerimaan sosial (*social acceptance*). Dalam konteks ini, narasi genealogis tidak lagi sekadar menjadi catatan silsilah, melainkan telah bertransformasi menjadi modal simbolik strategis yang digunakan aktor keturunan untuk meraih otoritas dan pengakuan publik, sekaligus memperkuat posisi tawar mereka dalam dinamika sosial dan politik masyarakat.

Genealogi tidak hanya dipahami sebagai catatan silsilah keluarga, tetapi juga sebagai simbol historis yang mengandung makna sosial dan politik yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi suatu kelompok dalam masyarakat. Provinsi Kepulauan Riau, dengan Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota sekaligus pusat sejarah Kesultanan Riau-Lingga, merupakan ruang yang sangat dinamis bagi politik identitas. Tanjungpinang memiliki keterikatan historis yang kuat dengan persekutuan politik Melayu-Bugis pada abad ke-18. Dua tokoh genealogis, yakni Daeng Celak dan Daeng Marewa, menjadi titik sentral konstruksi identitas Melayu di Tanjungpinang. Sebagaimana tercatat dalam *Tuhfat al-Nafis* karya Raja Ali Haji, persekutuan ini menjadi fondasi identitas yang hingga kini terus direproduksi oleh para aktor keturunan sebagai sumber legitimasi kultural di ruang publik.

Meskipun Pemerintah Kota Tanjungpinang dan lembaga adat telah melakukan berbagai upaya pelestarian untuk mengangkat ketokohan Daeng Celak dan Daeng Marewa, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Meskipun suku Melayu mendominasi demografi sebesar 35,6%, namun lebih dari separuh penduduk Tanjungpinang berasal dari latar belakang etnis non-Melayu yang heterogen. Kondisi ini membuat narasi genealogis tidak diterima secara seragam. Bagi sebagian kalangan, narasi tersebut adalah identitas inklusif dan warisan sejarah, namun bagi kelompok lain, narasi ini dipandang hanya sebagai simbol historis yang tidak relevan dengan kehidupan sosial modern.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa legitimasi kultural berbasis genealogis tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada kemampuan aktor keturunan dalam mereproduksi dan menginstitusionalisasikan narasi tersebut dalam konteks kekinian. Dukungan masyarakat tidak bersifat mutlak, melainkan bersyarat pada performativitas nilai kepemimpinan yang diharapkan oleh publik. Mengingat bahwa pemanfaatan ketokohan Daeng Celak dan Daeng Marewa bukan sekadar fenomena kultural, melainkan bagian dari dinamika politik identitas, maka diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menganalisis bagaimana para aktor keturunan membangun legitimasi kultural di tengah masyarakat Tanjungpinang yang kian beragam.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Penelitian mengenai politik identitas di tingkat lokal selama ini umumnya lebih banyak berfokus pada dinamika elektoral, perebutan kekuasaan formal dalam jabatan publik, maupun kajian tentang konflik etnis yang bersifat kontestatif. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek komodifikasi budaya untuk kepentingan politik praktis atau penggunaan identitas etnis sebagai instrumen mobilisasi massa secara makro yang bersifat sementara.

Di sisi lain, penelitian yang secara khusus mengkaji upaya memperoleh pengakuan yang lebih merata berbasis genealogis tokoh sejarah dalam kehidupan masyarakat modern masih sangat terbatas. Padahal, pengakuan publik terhadap ketokohan Daeng Celak dan Daeng Marewa di Kota Tanjungpinang bukan sekadar fenomena historis, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang membutuhkan artikulasi sosial agar tetap relevan di tengah keberagaman etnis. Selain itu, kajian yang secara spesifik mengolaborasi bagaimana aktor keturunan dan lembaga terkait melakukan upaya sistematis dalam mereproduksi makna simbolik tokoh genealogis guna meningkatkan pengakuan publik (*public recognition*) di tengah masyarakat yang heterogen, juga belum banyak ditemukan.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian berupa belum optimalnya kajian empiris yang menganalisis secara komprehensif mengenai upaya memperoleh pengakuan yang lebih merata berbasis genealogis serta tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pengakuan publik terhadap ketokohan tersebut di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan membedah bagaimana upaya-upaya dalam memperoleh pengakuan yang lebih merata dengan pemanfaatan ketokohan Daeng Celak dan Daeng Marewa dilakukan di tengah dinamika masyarakat yang kian kompleks.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena upaya penguatan legitimasi kultural berbasis genealogis Daeng Celak dan Daeng Marewa merupakan instrumen krusial dalam membentuk identitas Melayu yang inklusif serta mampu meningkatkan pengakuan publik di Kota Tanjungpinang. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akar genealogis tersebut akan terus menghambat terbentuknya legitimasi kultural yang kuat dan inklusif. Akibatnya, upaya pembentukan identitas daerah menjadi tidak optimal karena narasi genealogis gagal berfungsi sebagai perekat sosial, yang pada akhirnya membuat legitimasi tersebut kehilangan relevansinya di tengah masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai upaya memperoleh pengakuan sebagai dasar perumusan strategi yang efektif dalam mewujudkan legitimasi kultural identitas Melayu yang inklusif di Kota Tanjungpinang.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, Hasse Jubba et al. (2021) meneliti politik identitas Melayu Islam dalam mewujudkan budaya berintegritas di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menemukan bahwa Politik identitas Melayu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan adat ke dalam kepemimpinan tokoh lokal sebagai fondasi moral dan sosial guna memperkokoh integritas budaya serta legitimasi aktor dalam masyarakat.

Kedua, Desri Siagian et al. (2021) mengkaji politik identitas melalui strategi negosiasi marga dalam pernikahan amalgamasi etnis Batak dan Melayu di Kota Pangkalpinang. Penelitian ini menemukan bahwa praktik negosiasi marga dalam pernikahan campuran Batak-Melayu merupakan manifestasi politik identitas di mana penggunaan simbol genealogis berfungsi sebagai instrumen dominasi dan legitimasi untuk menegaskan posisi identitas keluarga dalam struktur sosial.

Ketiga, Kustiawan Tufail et al. (2024) meneliti politik identitas Melayu Malaysia dan multikulturalisme pada film Upin & Ipin. Penelitian ini menemukan bahwa ilm *Upin & Ipin* merepresentasikan politik identitas Melayu yang inklusif dengan memadukan simbol budaya, bahasa, dan nilai Islam sebagai fondasi identitas utama di tengah narasi harmonisasi multikulturalisme.

Keempat, Muhtar et al. (2025) mengkaji politik identitas melalui penguatan nilai kearifan lokal Duan Lolat sebagai strategi optimalisasi tata kelola desa yang inklusif dan partisipatif di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Penelitian ini menemukan bahwa penguatan identitas lokal dan kearifan adat Duan Lolat berfungsi sebagai instrumen politik identitas yang efektif dalam memperkuat kohesi sosial dan legitimasi pemerintah desa melalui penciptaan tata kelola yang inklusif serta partisipatif.

Kelima, Hedhri Nadhiran dan Deddy Ilyas (2022) meneliti politik identitas melalui proses adaptasi dan transformasi nilai-nilai Melayu dalam mengintegrasikan identitas etno-religius ke dalam struktur negara bangsa. Penelitian ini menemukan bahwa politik identitas Melayu di Indonesia

mencerminkan sifatnya yang lentur, inklusif, dan adaptif dalam mengintegrasikan nilai Islam serta budaya terbuka ke dalam kerangka negara bangsa melalui tiga fase historis yang berkelanjutan.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah *(novelty)* dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis pemanfaatan ketokohan genealogis sebagai strategi politik identitas dalam upaya memperoleh legitimasi kultural yang belum merata di tengah masyarakat heterogen. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas politik identitas berbasis agama, pernikahan lintas etnis, atau media populer, penelitian ini menitikberatkan pada dimensi genealogis sebagai instrumen simbolik legitimasi kultural dengan menggunakan teori Manuel Castells (Castells, 2010) sebagai kerangka analisis yang belum banyak diterapkan dalam konteks identitas Melayu-Bugis di Kepulauan Riau.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan ketokohan genealogis Daeng Celak dan Daeng Marewa oleh para keturunannya sebagai strategi politik identitas dalam upaya memperoleh legitimasi kultural di Kota Tanjungpinang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi pemanfaatan ketokohan genealogis dalam upaya memperoleh legitimasi kultural di Kota Tanjungpinang. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang diteliti bersifat kompleks, kontekstual, dan penuh makna simbolik yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif (Moleong, 2017). Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dengan pengumpulan data yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2026 hingga 25 Januari 2026.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan langsung terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2014). Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Herry Andrianto, S.E., M.M selaku Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, dipilih karena memiliki pemahaman menyeluruh terhadap kebijakan pelestarian budaya berbasis genealogis; (2) Muhammad Nazri, S.Sos selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, dipilih karena mengelola program *city branding* dan integrasi narasi genealogis dalam kebijakan; (3) Drs. H. Raja Ariza, M.M selaku aktor keturunan dan pejabat Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, dipilih sebagai informan kunci karena merupakan aktor genealogis yang aktif dalam birokrasi; (4) Aswandi Syahri, S.Pd., M.Pd. sebagai tokoh intelektual dan budayawan; (5) Wimmy D. Hidayat, S.E., M.Si selaku Pengurus LAM Kota Tanjungpinang; (6) Datuk Seri Lela Budaya Rida K. Liamsi, SPN selaku Aktor Jaringan Pendukung (Media Lokal); (7) Dr. Anastasi Wiwik Swastiwi, MA selaku Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Riau; (8) Mawi sebagai Juru Pelihara Makam; serta (9) perwakilan masyarakat dari berbagai latar belakang etnis sebagai representasi penerimaan sosial yang beragam.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (Miles, M and Huberman, 1994) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kerangka analisis menggunakan teori politik identitas Manuel Castells (Castells, 2010) melalui tiga dimensi utama: *legitimizing identity*, *resistance identity*, dan *project identity*. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Keturunan Daeng Celak dan Daeng Marewa dalam Memanfaatkan Ketokohan Genealogis untuk Memperoleh Legitimasi Kultural di Kota Tanjungpinang

Analisis mengenai upaya dalam memperoleh legitimasi kultural di Kota Tanjungpinang dilakukan melalui pendekatan teori *The Power of Identity* dari Manuel Castells (Castells, 2010) yang meliputi 3 dimensi utama yaitu *legitimizing identity, resistance identity, dan project identity*. Ketokohan genealogis dianalisis melalui tiga dimensi identitas tersebut yang membentuk pola interaksi aktor dengan masyarakat Tanjungpinang yang heterogen.

3.1.1. *Legitimizing Identity* (Identitas Legitimasi)

Legitimizing identity dalam penelitian ini telah terpenuhi melalui keberhasilan keturunan Daeng Celak dan Daeng Marewa dalam mereproduksi narasi sejarah, penggunaan simbol genealogis, serta pelembagaan identitas dalam ruang formal untuk memperoleh pengakuan kultural di Kota Tanjungpinang (Castells, 2010). Hal ini dibuktikan oleh konsistensi penggunaan gelar dan silsilah dalam ruang publik serta birokrasi, yang berfungsi sebagai modal kultural untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan masyarakat, sejalan dengan konsep "modal budaya" yang dikemukakan oleh Bourdieu (Bourdieu, 1986) mengenai legitimasi status sosial.

Legitimasi suatu identitas tidak hanya dibentuk melalui pengakuan simbolik, tetapi juga melalui penerimaan sosial dari masyarakat terhadap aktor yang membawa identitas tersebut. Dalam konteks pemerintahan, Harahap (2019) menjelaskan bahwa tingkat penerimaan dan kepuasan stakeholder terhadap aktor pemerintahan menjadi salah satu indikator penting dalam pembentukan legitimasi sosial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi tidak hanya bergantung pada status formal, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat mengakui dan menerima peran aktor dalam kehidupan sosial. Kondisi serupa terlihat pada keturunan Daeng Celak dan Daeng Marewa yang memperoleh legitimasi kultural melalui pengakuan masyarakat terhadap kontribusi dan peran mereka dalam pelestarian nilai-nilai budaya Melayu-Bugis.

Praktik ini juga selaras dengan temuan Hadiz (2011) yang menyatakan bahwa hubungan kekerabatan dan jaringan sosial merupakan sumber penting dalam memperoleh pengakuan pengaruh sosial di tingkat lokal Indonesia. Selain itu, keterlibatan aktif dalam Lembaga Adat Melayu (LAM) dan integrasi simbol-simbol genealogis ke dalam kebijakan budaya pemerintah daerah, seperti dalam pengembangan *city branding* berbasis narasi sejarah, membuktikan bahwa identitas genealogis telah divalidasi dan dilembagakan secara struktural. Proses pelembagaan ini memastikan bahwa identitas genealogis tidak sekadar diposisikan sebagai warisan keluarga, melainkan telah divalidasi dan diterima sebagai bagian dari tatanan budaya resmi di Tanjungpinang.

3.1.2. *Resistance Identity* (Identitas Resisten)

Resistance identity menurut Castells (Castells, 2010) mencakup upaya aktor dalam membentengi nilai identitas dari degradasi makna atau tekanan modernitas, namun dalam penelitian ini, dimensi tersebut belum terpenuhi secara maksimal sehingga menjadi hambatan utama dalam perolehan legitimasi kultural yang merata. Hasil observasi menunjukkan adanya resistensi kolektif dari keturunan Daeng Celak dan Daeng Marewa dalam menjaga kesucian narasi sejarah, yang justru berbenturan dengan pandangan kelompok masyarakat non-Melayu dan generasi muda yang menganggap narasi tersebut bersifat elitis serta kurang relevan dengan dinamika sosial modern (Lan, 2011). Akibatnya, alih-alih menjadi instrumen penguatan jati diri, *resistance identity* dalam kasus ini justru menciptakan sekat antara komunitas keturunan dengan masyarakat heterogen di Tanjungpinang, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai studi politik identitas lokal yang menyoroti sulitnya

menyatukan legitimasi tradisional dengan aspirasi masyarakat yang lebih inklusif dan meritokratis (Mubarok, 2023).

3.1.3. *Project Identity* (Identitas Proyek)

Project identity menurut Castells (Castells, 2010) merujuk pada upaya sadar aktor untuk mentransformasikan identitas mereka menjadi sebuah "proyek" yang inklusif agar dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan diterima secara luas dalam lingkup masyarakat yang lebih beragam. Dalam penelitian ini, dimensi tersebut telah terpenuhi melalui langkah-langkah transformatif keturunan Daeng Celak dan Daeng Marewa dalam mereposisi narasi genealogis ke dalam program kebudayaan yang lebih terbuka, seperti pelaksanaan festival budaya, pengembangan *city branding*, serta kolaborasi intensif dengan institusi pemerintah. Upaya ini merupakan bentuk adaptasi strategis untuk memperluas jangkauan legitimasi kultural di luar lingkaran komunitas adat, dengan mengaitkan warisan sejarah sebagai aset pembangunan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh warga Tanjungpinang tanpa memandang latar belakang etnis.

Pitono, Harahap, Kartiwi, dan Baidhowah (Pitono et al., 2023) menjelaskan bahwa institusi informal memiliki peran penting dalam membentuk tata kelola sosial dan memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap suatu nilai atau norma yang berkembang di luar struktur formal pemerintahan. Dalam konteks penelitian ini, ketokohan genealogis Daeng Celak dan Daeng Marewa dapat dipahami sebagai bagian dari institusi informal yang berfungsi mempertahankan nilai budaya, memperkuat identitas kolektif, serta membangun legitimasi kultural di tengah masyarakat Kota Tanjungpinang. Melalui proses ini, para aktor keturunan secara sadar tidak lagi sekadar mempertahankan warisan masa lalu, melainkan berupaya membangun hubungan baru dengan masyarakat heterogen untuk menciptakan legitimasi kultural yang lebih relevan dan berkelanjutan, yang terbukti efektif dalam meminimalkan sekat-sekat eksklusivitas yang sempat muncul pada dimensi *resistance identity*.

Rompon dan Sudarmono (2024) menunjukkan bahwa elite lokal memiliki peran strategis dalam mempertahankan eksistensi masyarakat adat melalui penguatan identitas budaya dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Temuan tersebut sejalan dengan kondisi di Kota Tanjungpinang, di mana keturunan Daeng Celak dan Daeng Marewa berperan sebagai aktor kultural yang tidak hanya menjaga memori sejarah, tetapi juga berupaya mempertahankan identitas Melayu-Bugis sebagai bagian dari warisan budaya lokal. Peran tersebut menunjukkan bahwa elite lokal dapat menjadi penghubung antara warisan sejarah dan kebutuhan masyarakat kontemporer dalam mempertahankan identitas kolektifnya.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya keturunan Daeng Celak dan Daeng Marewa dalam memperoleh legitimasi kultural di Kota Tanjungpinang melalui tiga dimensi identitas Castells (2010)yaitu *legitimizing*, *resistance*, dan *project identity* telah berjalan melalui proses yang dinamis namun belum sepenuhnya inklusif. Hasil ini sejalan dengan kerangka kerja Manuel Castells (2010) dalam *The Power of Identity* yang menegaskan bahwa identitas bukanlah entitas statis, melainkan konstruksi sosial yang terus direproduksi melalui interaksi antara aktor dengan struktur kekuasaan dan masyarakat luas.

Penelitian ini memberikan analisis yang lebih spesifik karena berfokus pada performativitas genealogis sebagai strategi politik identitas di tingkat kota, dengan mengukur kualitas legitimasi berdasarkan tiga dimensi identitas secara komprehensif. Hal ini berbeda dengan kajian Thung Ju Lan (2011) yang lebih menekankan pada politik etnisitas dan multikulturalisme secara umum, maupun penelitian Choi (2011) yang fokus pada akses kekuasaan politik praktis melalui jaringan kekerabatan. Kekhasan temuan ini menegaskan bahwa legitimasi kultural berbasis genealogis tidak cukup hanya

dengan modal simbolik atau gelar saja, tetapi sangat bergantung pada sejauh mana aktor mampu melakukan transformasi dari identitas yang bersifat eksklusif menuju identitas proyek yang inklusif bagi masyarakat heterogen.

Penelitian menemukan bahwa faktor utama yang mendukung keberhasilan perolehan legitimasi kultural melalui dimensi *legitimizing* dan *project identity* meliputi: (1) pemanfaatan gelar dan silsilah sebagai modal kultural yang diakui secara formal dalam struktur birokrasi (Bourdieu, 1986); (2) keterlibatan aktif dalam institusi adat seperti Lembaga Adat Melayu (LAM) yang memperkuat validitas peran aktor sebagai "penjaga marwah"; serta (3) integrasi narasi historis ke dalam *city branding* dan program kebudayaan pemerintah daerah yang memperluas jangkauan legitimasi ke ruang publik.

Adapun faktor penghambat yang menyebabkan dimensi *resistance identity* belum terpenuhi secara optimal meliputi: (1) resistensi masyarakat non-Melayu yang memandang narasi genealogis sebagai bentuk elitisme budaya yang eksklusif, sejalan dengan temuan Sofi Mubarok (Mubarok, 2023) mengenai polarisasi politik identitas; (2) kesenjangan persepsi antara generasi muda yang cenderung meritokratis dengan aktor keturunan yang masih memegang teguh legitimasi berbasis garis keturunan; serta (3) kurangnya ruang dialog lintas budaya yang sistematis untuk mentransformasi narasi sejarah menjadi identitas bersama yang inklusif di tengah masyarakat Tanjungpinang yang heterogen. Temuan ini menolak pandangan bahwa ketokohan genealogis secara otomatis menjamin legitimasi kultural, karena legitimasi tersebut bersifat parsial dan sangat bergantung pada penerimaan sosiologis masyarakat setempat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa upaya keturunan Daeng Celak dan Daeng Marewa dalam memperoleh legitimasi kultural di Kota Tanjungpinang dua dimensi telah terpenuhi sementara satu dimensi belum tercapai secara maksimal. Dimensi *legitimizing identity* terpenuhi melalui penggunaan gelar, silsilah, dan integrasi simbol genealogis ke dalam kebijakan budaya pemerintah daerah, sehingga pengakuan di tingkat elite dan institusional telah berhasil diperoleh. Dimensi *project identity* terpenuhi melalui upaya transformatif berupa *repositioning* narasi genealogis melalui festival budaya, *city branding*, dan platform digital sebagai langkah adaptif memperluas jangkauan pengakuan. Namun demikian, dimensi *resistance identity* belum terpenuhi secara maksimal karena masih kuatnya resistensi dari masyarakat non-Melayu yang memandang narasi genealogis sebagai eksklusif, serta munculnya resistensi generasi muda yang lebih mengutamakan kompetensi individual. Dengan demikian, legitimasi kultural berbasis genealogis di Kota Tanjungpinang masih bersifat parsial. Meskipun telah memperoleh pengakuan di tingkat elite dan institusional, legitimasi tersebut belum diterima secara merata dan inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat yang heterogen. Guna memperluas pengakuan kultural yang lebih merata, disarankan agar pihak-pihak terkait dapat merancang ruang dialog lintas budaya yang lebih terbuka untuk menyatukan narasi historis sebagai identitas kolektif kota, serta mengurangi kesan eksklusivitas dengan lebih mengedepankan nilai-nilai yang dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang asal-usul.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas pada analisis pemanfaatan ketokohan genealogis dari sudut pandang aktor keturunan, tokoh adat, dan birokrat pemerintah daerah di Kota Tanjungpinang, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada konteks daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperdalam kajian dengan menjadikan kelompok masyarakat heterogen khususnya komunitas non-Melayu dan generasi muda sebagai subjek utama penelitian, serta memperluas cakupan wilayah ke daerah-daerah lain di Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik serupa, sehingga menghasilkan temuan yang lebih representatif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh informan penelitian, khususnya Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, serta Lembaga Adat Melayu Kota Tanjungpinang yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). Greenwood Press.

Castells, M. (2010). *The Power of Identity*. Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781444318234

Choi, N. (2011). *Local Politics in Indonesia: Pathways to Power*. Routledge. https://www.routledge.com/Local-Politics-in-Indonesia-Pathways-to-Power/Choi/p/book/9781138102934

Hadiz, V. (2011). Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective. *Bibliovault OAI Repository, the University of Chicago Press*.

Hall, S. (1996). *Cultural Identity and Diaspora BT - Identity: Community, Culture, Difference* (J. Rutherford (ed.); pp. 222–237). Lawrence & Wishart.

Harahap, A. S. (2019). Survei Kepuasan Stakeholders Terhadap Kinerja Alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP), 1–10. https://doi.org/10.33701/jpkp.v1i1.710

Jubba, H., Rafi, M., & Qodir, Z. (2021). Politik Identitas Melayu Islam sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Berintegritas. *Politicon:* Jurnal Ilmu Politik. https://doi.org/10.15575/politicon.v3i1.11481

Lan, T. J. (2011). *Heterogeneity, politics of ethnicity, and multiculturalism What is a viable framework for Indonesia? Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, *13*(2), 279. https://doi.org/10.17510/wjhi.v13i2.24

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Mubarok, S. (2023). Akar Politik Identitas di Indonesia. *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, Jurnal Abdimas Bina Bangsa, *6*(1), 1–19. https://doi.org/10.5281/zenodo.8035777

Muhtar, Desviona, N., & Rukoyah. (2025). Penguatan Identitas Lokal Dan Optimalisasi Potensi Desa Olilit Melalui Pendekatan Sosio-Budaya, Ekonomi, Dan Politik Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jurnal Abdimas Bina Bangsa, 6(1), 503–515. https://doi.org/10.46306/jabb.v6i1.1663

Nadhiran, H., & Ilyas, D. (2022). Identitas Politik Melayu Indonesia Dan Penerimaan Konsep Negara Bangsa. Repository UIN Raden Fatah Palembang. https://repository.radenfatah.ac.id/26478/

Pitono, A., Harahap, A. S., Kartiwi, K., & Baidhowah, A. R. (2023). *Informal Institutions, Government Regulatory Functions, And Development Of Governance Studies.* Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, *16*(2), 107–123. https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i2.3746

Rompon, R. S., & Sudarmono, S. (2024). *The Role Of Local Elite In Strengthening The Existence Of Indigenous Communities In Buntu Pepasan, North Toraja.* Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, *17*(2), 17–31. https://doi.org/10.33701/jppdp.v17i2.4640

Siagian, D., Ranto, R., & Saputri, R. A. (2021). Politik Identitas : Strategi Negosiasi Marga dalam Pernikahan Amalgamasi pada Etnis Batak dan Melayu. Jurnal Studi Inovasi, *1*(3), 80–85. https://doi.org/10.52000/jsi.v1i3.38

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Taylor, C. (1994). *The Politics of Recognition BT - Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition (A. Gutmann (ed.); pp. 25–73). Princeton University Press.*

Tufail, K. (2024). Politik Identitas Melayu Malaysia dan Multikulturalisme Pada Film Upin & Ipin. Jurnalika, *8*(2), 117–127. https://doi.org/10.37949/jurnalika82130